



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa dimaksud terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel, proporsional, efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pengaturan dalam suatu Peraturan Bupati Toba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Toba Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Toba;
16. Peraturan Bupati Toba Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau selanjutnya BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang bersumber dari APBD, APBN dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

17. Sekretaris Desa yang selanjutnya disingkat dengan Sekdes adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi/ Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kasi/ Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
23. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah tim yang bertugas melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di Tingkat Kabupaten.
24. Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah tim yang bertugas melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa di tingkat kecamatan.
25. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Penghasilan Tetap Aparatur Desa yang selanjutnya disebut SilTap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa atas jabatan sebagai Aparatur Desa.
27. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
28. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa dari jabatan yang sama di lingkungan Pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDes.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDDes.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

34. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan lainnya yang dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Tujuan ADD adalah:
- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan infrastruktur pedesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - h. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
 - i. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; dan
 - j. meningkatkan pemerataan pendapatan desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

BAB III BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 71.500.000.000,- (*tujuh puluh satu milyar lima ratus juta rupiah*).
- (2) Besaran ADD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. mengalokasikan Penghasilan Tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan Iuran Jaminan Sosial bagi Aparatur Desa;

- b. setelah dikurangi Penghasilan Tetap bagi Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan Iuran Jaminan Sosial, ADD dibagi secara merata kepada Pemerintah Desa sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dan 5% (lima per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah dan indeks kesulitan geografis.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN ADD

Pasal 5

ADD digunakan untuk pembiayaan:

- a. SilTap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kinerja Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD;
- b. Jaminan Sosial bagi Aparat Desa;
- c. Operasional Pemerintahan Desa dan BPD;
- d. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

BAB V PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 6

- (1) Belanja penggunaan ADD dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, pengelolaan kekayaan desa atau aset yang diatur dan diurus oleh desa.
- (2) Pendapatan lainnya diluar ADD dapat diatur tersendiri dalam Peraturan lainnya.

Pasal 7

- (1) Agar pengelolaan ADD dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaan ADD harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;
 - b. seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD direncanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dengan mengacu pada RPJMDes, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dijabarkan dalam RKPDes;
 - c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
 - d. penggunaan ADD dilaksanakan dengan prinsip Hemat, Terarah dan Terkendali, Akuntabel, Transparan, serta dilakukan dengan tertib, tepat waktu dan disiplin anggaran;
 - e. pengelolaan ADD yang telah dimusyawarahkan dan disepakati antara pemerintah desa dengan BPD dituangkan dalam APBDes dengan Peraturan Desa.
- (2) ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

- (3) Mengalokasikan Besaran Siltap bagi Aparatur Pemerintah Desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
1. Kepala Desa Rp. 2.426.640,00,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh ribu rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 2. Sekretaris Desa non PNS Rp. 2.224.420,00,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 3. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kadus Rp. 2.022.200,00,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (4) Mengalokasikan Dana tunjangan kinerja Aparatur Pemerintah Desa untuk per orang per bulan, terdiri dari:
- a) Kepala Desa/
penjabat Kepala Desa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b) sekretaris desa PNS dan non PNS Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) KaSi/KaUr Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- (5) Mengalokasikan Tunjangan BPD untuk per orang per bulan sesuai dengan keuangan desa, terdiri dari:
- a) Ketua Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b) Wakil ketua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c) Sekretaris Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Anggota Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (6) Mengalokasikan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Desa sebesar 14.411,- (empat belas ribu empat ratus sebelas rupiah) per bulan selama setahun.
- (7) Belanja Operasional Pemerintah desa dan BPD dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa serta berdasarkan standar harga pasar setempat/terdekat yang tidak boleh melebihi standar harga Kabupaten.
- (8) Khusus untuk besaran biaya Perjalanan Dinas dan bantuan transport diatur sebagai berikut:
1. Bantuan transport :
Dusun ke Dusun dalam satu Desa
 - Kepala Desa/Ketua BPD, Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - Perangkat Desa/Wakil
 - Ketua Sekretaris /Anggota BPD
 2. Perjalanan Dinas
Perjalanan dalam, di luar Kecamatan dan keluar Kabupaten
 - Kepala Desa/Ketua BPD disamakan dengan gol. III
 - Perangkat Desa disamakan dengan gol. II
 - Wakil Ketua/Sekretaris/ Anggota BPD disamakan dengan gol. II

- (9) Biaya Honorarium Pengelola Keuangan tingkat Desa berdasarkan kemampuan keuangan Desa dengan maksimal:
- 1) PKPKD Rp. 600.000 perbulan;
 - 2) Koordinator PPKD Rp. 200.000 perbulan;
 - 3) Pelaksana Kegiatan Rp. 200.000 perbulan;
 - 4) Kaur Keuangan Rp. 200.000 perbulan;
 - 5) Operator Sistem Keuangan Desa Rp. 200.000 perbulan;
 - 6) Operator Profil Desa Rp. 200.000 perbulan;
 - 7) Operator SIKS-NG Rp. 200.000 perbulan;
 - 8) Operator Lainnya.
- (10) Kemampuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan dari Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki hak untuk menerima Penghasilan Tetap;
- (2) Dana tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa diberikan besarnya tidak boleh melebihi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (4) yang sumber dananya berasal dari ADD.
- (3) Perangkat Desa yang diangkat menjadi pelaksana tugas menerima tunjangan kinerja dari jabatan yang lebih tinggi, dihitung minimal 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang diberhentikan dari jabatannya, maka bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian tidak lagi menerima SilTap dan tunjangan kinerja.
- (5) SilTap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal Sekdes yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, maka koordinator PPKD diangkat dari salah satu Kepala Seksi/Kepala Urusan.
- (7) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya setiap hari kerja dan apabila yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya maka akan diberikan sanksi berupa pemotongan Siltap sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari kerja dari Siltap yang diterimanya.
- (8) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan per hari selama yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan, dan hasil pemotongan tersebut menjadi Silpa ADD tahun berjalan di Rekening Kas Desa.

BAB VI KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran bagi Peserta Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

- (4) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan.
- (5) Besaran iuran bagi Peserta Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu sebesar upah minimum Kabupaten.
- (6) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) PPKD Selaku BUD melakukan pemotongan Iuran Peserta sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf b berdasarkan upah minimum Kabupaten;
- (2) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari SILTAP masing-masing peserta.
- (3) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening BPJS Kesehatan.
- (4) Kepala Desa/Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan pemotongan iuran BPJS Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan mendukung kegiatan PKK pada desa binaan tingkat Kabupaten maksimal dana yang digunakan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan mendukung kegiatan PKK pada desa binaan tingkat kecamatan maksimal dana yang digunakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (3) Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan mendukung kegiatan PKK bukan Desa binaan maksimal dana yang digunakan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (5) Pengeluaran yang mendukung kegiatan pembinaan kemasyarakatan kegiatan PKK dibayarkan sejak Januari.

Pasal 12

Kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat dalam rangka mengikuti hari besar, keagamaan dan kegiatan lainnya dapat diberikan bantuan transport sebesar Rp. 100.000,-/orang (seratus ribu rupiah per orang) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VII

ASAS DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 13

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (3) Camat menghunjuk Operator Sistem Keuangan Desa tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan dibebankan kepada anggaran masing-masing Kecamatan.

- (4) Pengelolaan Keuangan Desa difasilitasi Pendamping Desa (tenaga ahli, pendamping desa pemberdayaan/teknik dan pendamping lokal desa) terhadap penggunaan Keuangan Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pemanfaatan.
- (5) Fasilitasi yang dilakukan pendamping desa (pendamping Desa pemberdayaan/teknik dan pendamping lokal Desa) wajib melaporkan hasil pendampingan kepada Camat yang bersangkutan.
- (6) Fasilitasi yang dilakukan pendamping desa (tenaga ahli) wajib melaporkan hasil pendampingan kepada Dinas PMDPPA Kabupaten Toba.

BAB VIII MEKANISME PENCAIRAN ADD

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa :
 - a. tahap I : 50% (lima puluh per seratus) paling lambat bulan Juni 2022;
 - b. tahap II : 50% (lima puluh per seratus) paling lambat bulan Desember 2022.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan permohonan kepada Bupati Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah diverifikasi Camat, dengan melampirkan:
 - a. surat rekomendasi Camat (asli);
 - b. hasil verifikasi Camat (asli);
 - c. surat Pengantar Camat (asli);
 - d. peraturan Desa tentang ADD terlampir masing-masing RAB;
 - e. peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahun sebelumnya; dan
 - f. fotocopy Rekening Desa.
- (4) Penyaluran ADD tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus) dilakukan Kepala Desa dengan menyampaikan Permohonan kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah diverifikasi Camat, dengan melampirkan:
 - a. perdes tentang Perubahan APBDes bagi desa yang melakukan perubahan APBDes terlampir masing-masing RAB apabila ada perubahan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I;
 - c. foto Copy Rekening Kas Desa.
- (5) Kepala Desa menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan RKD kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban ADD.
- (2) Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena objek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (5) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa wajib diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Camat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan didelegasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten, dan Camat.
- (3) Bupati dalam melakukan pengawasan didelegasikan Inspektorat Kabupaten.
- (4) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan masing-masing.
- (5) Camat dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana pada ayat (4) diatas meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan; dan
 - c. Pelaporan.

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut :

- a. pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan ADD;
- b. pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD;
- c. pembinaan dilaksanakan oleh Dinas PMDP dan PA serta pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas intern Kabupaten merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Permendagri 73 Tahun 2020 tentang pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya diupayakan di tingkat Desa.
- (2) Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan di tingkat Desa, maka Camat dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya, dengan tetap didasarkan kepada musyawarah/mufakat.
- (3) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan, maka Bupati dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Bagi Desa yang tidak melaksanakan Kegiatan ataupun penghematan belanja yang didanai ADD dalam APBDes Tahun Anggaran 2022 menjadi SILPA di Rekening Desa dibuktikan dengan Buku Rekening Desa, dan merupakan pos penerimaan pembiayaan yang dipergunakan di tahun berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 31 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA.



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : **7** TAHUN 2022
 TANGGAL : **31 Maret 2022**
 TENTANG : PENETAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOBA

TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN PENGHASILAN TETAP APARATUR DESA, TUNJANGAN APARATUR, TUNJANGAN BPD, IURAN KETENAGAKERJAAN DAN BOP PEMERINTAHAN DESA

YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEC./DESA	PENGHASILAN TETAP						BPJS KETENAGAKERJAN	TUNJANGAN APARATUR	TUNJANGAN BPD	TOTAL SILTAP, BRJS, TUNJANGAN APARATUR, DAN TUNJANGAN BPD	BOP PEMERINTAHAN DESA	JUMLAH				
		KEPALA DESA	SEKDES NON PNS	KASI DAN KAUR	KADUS	3	4							5	6	7	8
I	KEC. PARMAKSIAW																
1	Banjar Ganjang	29,119,680	0	145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	309,085,932	8,398,644							
2	Bius Gu Barat	29,119,680	26,693,040	121,332,000	24,266,400	1,383,456	6,900,000	28,200,000	237,894,576	8,357,061							
3	Dolok Nauli	29,119,680	0	121,332,000	48,532,800	1,383,456	6,900,000	28,200,000	235,467,936	8,209,887							
4	Jonggi Manulus	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,224,342							
5	Lumban Huala	29,119,680	0	145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,451,424							
6	Lumban Manurung	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,232,073							
7	Lumban Sitorus	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,280,060							
8	Pangombusan	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,722,414							
9	Siantar Utara	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,320,255							
10	Tangga Batu I	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	2,075,184	7,200,000	28,200,000	335,951,904	8,632,692							
11	Tangga Batu II	29,119,680	0	145,598,400	24,266,400	1,383,456	7,200,000	28,200,000	235,767,936	8,357,687							
	TOTAL	320,316,480	186,851,280	1,553,049,600	630,926,400	18,676,656	78,600,000	310,200,000	3,098,620,416	92,186,539							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	KEC. TAMPAHAN										
1	Cugur Aekraja	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	47,400,000	328,285,932	8,585,722	336,871,654
2	Lantong Nihuta	29,119,680		145,598,400	169,864,800	2,421,048	7,200,000	37,800,000	392,003,928	8,418,506	400,422,434
3	Meat	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	37,800,000	294,246,600	8,318,139	302,564,739
4	Tangga Batu Barat	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,211,915	292,858,515
5	Tangga Batu Timur	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	2,075,184	7,200,000	28,200,000	335,951,904	8,189,643	344,141,547
6	Tara Bunga	29,119,680	26,693,040	145,598,400	121,332,000	2,248,116	7,200,000	28,200,000	360,391,236	8,160,280	368,551,516
	TOTAL	174,718,080	53,386,080	873,590,400	630,926,400	12,105,240	43,200,000	207,600,000	1,995,526,200	49,884,205	2,045,410,405
III	KEC. ULUAN										
1	Dolak Nagelang	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,187,456	268,394,724
2	Dolak Saribu Janji Matogu	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,217,000	295,290,240
3	Dolak Saribu Lumban Nabolon	29,119,680		121,332,000	97,065,600	1,556,388	6,900,000	28,200,000	284,173,668	8,230,736	292,404,404
4	Lumban Binanga	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	37,800,000	294,246,600	8,156,927	302,403,527
5	Lumban Holbung	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,233,983	292,880,583
6	Lumban Nabolon	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	335,778,972	8,128,673	343,907,645
7	Marom	29,119,680		121,332,000	72,799,200	1,902,252	6,900,000	37,800,000	269,853,132	8,506,935	278,360,067
8	Parbagasar Janji Matogu	29,119,680	26,693,040	97,065,600	48,532,800	1,383,456	6,600,000	28,200,000	237,594,576	8,176,389	245,770,965
9	Parhabinsaran Janji Matogu	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	37,800,000	321,112,572	8,140,223	329,252,795
10	Parik	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,208,575	292,855,175
11	Pantor Janji Matogu	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,124,422	292,771,022
12	Panturuan Janji Matogu	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,513,572	8,138,227	319,650,799
13	Sampuara	29,119,680		121,332,000	72,799,200	1,556,388	6,900,000	37,800,000	269,507,268	8,268,312	277,775,580
14	Sibuntuon	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	37,800,000	294,246,600	8,126,398	302,372,998
15	Sigaoi Barat	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,077,352	292,723,952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Sigaol Timur	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	37,800,000	294,246,600	8,169,984	302,416,584
17	Siregar AekNalas	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,121,455	295,194,695
	TOTAL	495,034,560	160,158,240	2,353,840,800	1,189,053,600	29,225,508	120,900,000	537,000,000	4,885,212,708	139,213,047	5,024,425,755
IV	KEC. SIGUMPAR										
1	Barua Huta	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,109,654	319,622,226
2	Dolok Jior	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,113,416	292,760,016
3	Maju	29,119,680		121,332,000	72,799,200	1,556,388	6,900,000	28,200,000	259,907,268	8,106,677	268,013,945
4	Marsangap	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	309,085,932	8,240,116	317,325,048
5	Nauli	29,119,680	26,693,040	121,332,000	97,065,600	1,902,252	6,900,000	28,200,000	311,212,572	8,367,214	319,579,786
6	Sigumpar	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	37,800,000	318,685,932	8,346,552	327,032,484
7	Sigumpar Barat	29,119,680	26,693,040	121,332,000	72,799,200	1,729,320	6,900,000	37,800,000	296,373,240	8,109,380	304,482,620
8	Sigumpar Julu	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,060,999	292,707,599
9	Situa-tua	29,119,680		121,332,000	72,799,200	1,556,388	6,900,000	28,200,000	259,907,268	8,264,043	268,171,311
	TOTAL	262,077,120	80,079,120	1,213,320,000	727,992,000	15,909,744	63,600,000	273,000,000	2,635,977,984	73,718,051	2,709,696,035
V	KEC. NASSAU										
1	Batu Marupak	29,119,680	26,693,040	145,598,400	145,598,400	2,421,048	7,200,000	28,200,000	384,830,568	8,340,315	393,170,883
2	Cinta Damai	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	9,062,028	296,135,268
3	Liattondung	29,119,680	26,693,040	121,332,000	97,065,600	1,902,252	6,900,000	28,200,000	311,212,572	8,877,695	320,090,267
4	Lumban Rau Tengah	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,515,523	293,162,123
5	Lumban Rau Tenggara	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,619,217	320,131,789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Lumban Rau Timur	29,119,680	26,693,040	121,332,000	97,065,600	1,902,252	6,900,000	28,200,000	311,212,572	8,370,282	319,582,854
7	Lumban Rau Utara	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	2,075,184	7,200,000	28,200,000	335,951,904	8,600,203	344,552,107
8	Napajoring	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,204,245	292,850,845
9	Siantarasa	29,119,680	26,693,040	145,598,400	24,266,400	1,556,388	7,200,000	28,200,000	262,633,908	8,215,556	270,849,464
10	Sipagabu	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	2,075,184	7,200,000	28,200,000	335,951,904	8,825,178	344,777,082
	TOTAL	291,196,800	213,544,320	1,407,451,200	825,057,600	19,022,520	71,400,000	282,000,000	3,109,672,440	85,630,242	3,195,302,682
VI	KEC. LAGUBOTI										
1	Aruan	29,119,680		121,332,000	72,799,200	1,556,388	6,900,000	28,200,000	259,907,268	8,158,914	268,066,182
2	Gasaribu	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,130,984	268,338,252
3	Hananatas I	29,119,680		145,598,400	121,332,000	2,075,184	7,200,000	28,200,000	333,525,264	8,111,388	341,636,652
4	Hananatas II	29,119,680		145,598,400	121,332,000	2,075,184	7,200,000	28,200,000	333,525,264	8,234,571	341,759,835
5	Lumban Bagan	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	37,800,000	269,807,268	8,162,135	277,969,403
6	Lumban Binanga	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,048,785	292,695,385
7	Ompu Raja Hatulian	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,111,610	319,624,182
8	Ompu Raja Hutapea	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	37,800,000	321,112,572	8,078,553	329,191,125
9	Ompu Raja Hutapea Timur	29,119,680	26,693,040	97,065,600	145,598,400	2,075,184	6,600,000	28,200,000	335,351,904	8,128,501	343,480,405
10	Pardinggaran	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	309,085,932	8,116,306	317,202,238
11	Pardomuan Nauli	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	37,800,000	318,685,932	8,385,910	327,071,842
12	Pintu bosi	29,119,680	26,693,040	97,065,600	121,332,000	1,902,252	6,600,000	37,800,000	320,512,572	8,279,397	328,791,969
13	Sibarani Nasampulu / Namungku	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	37,800,000	321,112,572	8,560,645	329,673,217
14	Sibuea	29,119,680		121,332,000	169,864,800	2,248,116	6,900,000	37,800,000	367,264,596	8,279,852	375,544,448
15	Sidulang	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,328,540	292,975,140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Sinarubung	29,119,680	26,693,040	145,598,400	121,332,000	2,248,116	7,200,000	28,200,000	360,391,236	8,261,023	368,652,259
17	Sintong Marupi	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	37,800,000	318,685,932	8,393,027	327,078,959
18	Siraja Gorat	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	2,075,184	7,200,000	28,200,000	335,951,904	8,067,657	344,019,561
19	Siungkola	29,119,680		145,598,400	121,332,000	2,075,184	7,200,000	37,800,000	343,125,264	8,115,809	351,241,073
20	Sitohama	29,119,680		97,065,600	121,332,000	1,729,320	6,600,000	47,400,000	303,246,600	8,414,171	311,660,771
21	Tinggi Mipasir	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	37,800,000	269,807,268	8,129,271	277,936,539
22	Ujung Tanduk	29,119,680		145,598,400	169,864,800	2,421,048	7,200,000	28,200,000	382,403,928	8,343,797	390,747,725
	TOTAL	640,632,960	186,851,280	3,009,033,600	2,183,976,000	42,022,476	156,800,000	726,000,000	6,944,516,316	180,840,846	7,125,357,162
VII	KEC. BORBOR										
1	Aek Unsimi	29,119,680		145,598,400	121,332,000	2,075,184	7,200,000	28,200,000	333,525,264	8,353,553	341,878,817
2	Hutagurur	29,119,680	26,693,040	145,598,400	169,864,800	2,593,980	7,200,000	28,200,000	409,269,900	8,347,475	417,617,375
3	Janji Maria	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,148,182	295,221,422
4	Lintong	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,340,903	292,987,503
5	Lumban Sewa	29,119,680	26,693,040	121,332,000	48,532,800	1,556,388	6,900,000	28,200,000	262,333,908	8,219,615	270,553,523
6	Natumingka	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,627,773	293,274,373
7	Pangururan	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	309,085,932	8,089,287	317,175,219
8	Pangururan II	29,119,680	26,693,040	121,332,000	72,799,200	1,729,320	6,900,000	28,200,000	286,773,240	8,200,444	294,973,684
9	Pangururan III	29,119,680	26,693,040	121,332,000	97,065,600	1,902,252	6,900,000	28,200,000	311,212,572	8,083,597	319,296,169
10	Pardomuan Nauli	29,119,680		121,332,000	72,799,200	1,556,388	6,900,000	28,200,000	259,907,268	8,179,652	268,086,920
11	Pasar Borbor	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,088,109	319,600,681
12	Purbatua	29,119,680	26,693,040	121,332,000	72,799,200	1,729,320	6,900,000	28,200,000	286,773,240	8,293,705	295,068,945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Rianiate	29,119,680		121,332,000	145,598,400	2,075,184	6,900,000	28,200,000	333,225,264	8,424,944	341,650,208
14	Rigajang	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,166,346	295,239,586
15	Simare	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,350,550	319,863,122
	TOTAL	436,795,200	240,237,360	2,038,377,600	1,286,119,200	27,842,052	106,200,000	423,000,000	4,558,571,412	123,916,135	4,682,487,547
VIII	KEC. PINTU POHAN										
1	Ambar Halir	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,256,885	319,769,457
2	Halado	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,902,252	7,200,000	28,200,000	287,246,172	8,251,377	295,497,549
3	Meranti Tengah	29,119,680	26,693,040	145,598,400	121,332,000	1,729,320	7,200,000	37,800,000	369,472,440	8,857,056	378,329,496
4	Meranti Timur	29,119,680	26,693,040	145,598,400	145,598,400	2,248,116	7,200,000	37,800,000	394,257,636	9,311,281	403,568,917
5	Meranti Utara	29,119,680		145,598,400	121,332,000	2,075,184	7,200,000	37,800,000	343,125,264	9,119,933	352,245,197
6	Pintu Pohan	29,119,680		145,598,400	72,799,200	2,075,184	7,200,000	37,800,000	294,592,464	8,543,617	303,136,081
7	Pintu Pohan Dolok	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,223,564	268,430,832
	TOTAL	203,837,760	106,772,160	1,019,188,800	630,926,400	13,488,596	50,400,000	235,800,000	2,260,413,816	60,563,713	2,320,977,529
IX	KEC. AJIBATA										
1	Horsik	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	309,085,932	8,110,284	317,196,216
2	Motung	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,285,721	268,492,989
3	Pardamean Ajibata	29,119,680	26,693,040	145,598,400	121,332,000	2,248,116	7,200,000	28,200,000	360,391,236	8,394,930	368,786,166
4	Pardamean Sibisa	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,477,380	293,123,980
5	Pardomuan Ajibata	29,119,680	0	145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,279,572	268,486,840
6	Pardomuan Motung	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,084,050	319,596,622
7	Parsaoran Sibisa	29,119,680		121,332,000	72,799,200	1,556,388	6,900,000	28,200,000	259,907,268	8,417,470	268,324,738
8	Sigapiton	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,202,483	268,409,751
9	Sirungkungan	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,226,484	292,873,084
		262,077,120	53,386,080	1,286,119,200	655,192,800	15,736,312	64,500,000	253,800,000	2,590,812,012	74,478,374	2,665,290,386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	KEC. SIANTAR WARUMONDA										
1	Narumonda I	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	37,800,000	294,246,600	8,151,297	302,397,897
2	Narumonda II	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,041,226	292,687,826
3	Narumonda III	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,128,885	319,641,457
4	Narumonda IV	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,215,632	319,728,204
5	Narumonda V	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,199,121	292,845,721
6	Narumonda VI	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,115,920	319,628,492
7	Narumonda VII	29,119,680		121,332,000	48,532,800	1,383,456	6,900,000	28,200,000	235,467,936	8,093,531	243,561,467
8	Narumonda VIII	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,049,897	268,257,165
9	Siantar Stho-jo	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,108,321	268,315,589
10	Siantar Dongshu	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,075,728	292,722,328
11	Siantar Sigordang	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,057,411	268,264,679
12	Siantar tonga-tonga I	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,037,901	292,684,501
13	Siantar Tonga-tonga II	29,119,680		121,332,000	48,532,800	1,383,456	6,900,000	28,200,000	235,467,936	8,110,853	243,578,789
14	Siantar Tonga-tonga III	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,059,699	319,572,271
		407,675,520	106,772,160	1,989,844,800	897,856,800	23,691,684	100,200,000	404,400,000	3,930,440,964	113,445,422	4,043,886,386
XI	KEC. BOMATUA LUNASI										
1	Harungguan	29,119,680		121,332,000	48,532,800	1,383,456	6,900,000	28,200,000	235,467,936	8,075,488	243,543,424
2	Lumban Loba	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,098,321	268,305,589
3	Lumban sangkalan	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,089,695	295,162,935
4	Nagatumbul	29,119,680	0	145,598,400	48,532,800	1,902,252	7,200,000	28,200,000	260,553,132	8,110,107	268,663,239
5	Nagatumbul Timur	29,119,680	26,693,040	121,332,000	72,799,200	1,383,456	6,900,000	28,200,000	286,427,376	8,143,219	294,570,595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pardlok Lumban Lobu	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,144,958	319,657,530
7	Pantorian Lumban Lobu	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,117,945	319,630,517
8	Sibadihon	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	37,800,000	296,673,240	8,187,718	304,860,958
9	Sihong	29,119,680		121,332,000	48,532,800	1,383,456	6,900,000	28,200,000	235,467,936	8,227,427	243,695,363
10	Silamosik II	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,098,182	268,305,450
11	Silombu	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,092,113	319,604,685
12	Sinar Sabungan	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	309,085,932	8,304,209	317,390,141
		349,436,160	160,158,240	1,674,381,600	727,992,000	20,233,044	85,500,000	348,000,000	3,365,701,044	97,689,382	3,463,390,426
XII	KEC. HABINSARAN									0	
1	Aek Ulok	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,106,266	295,179,506
2	Batu Nabelon	29,119,680	26,693,040	145,598,400	169,864,800	2,593,380	7,200,000	28,200,000	409,269,900	8,354,678	417,624,578
3	Hitetano	29,119,680	26,693,040	145,598,400	121,332,000	2,248,116	7,200,000	28,200,000	360,391,236	8,549,555	368,940,791
4	Lobu Hole	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	37,800,000	321,112,572	8,336,954	329,449,526
5	Lumban Balik	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,524,447	320,037,019
6	Lumban Gaol	29,119,680	26,693,040	145,598,400	145,598,400	2,421,048	7,200,000	28,200,000	384,830,568	8,322,427	393,152,995
7	Lumban Lintong	29,119,680	26,693,040	121,332,000	145,598,400	2,248,116	6,900,000	28,200,000	360,091,236	8,245,732	368,336,968
8	Lumban Pea	29,119,680		145,598,400	169,864,800	2,421,048	7,200,000	37,800,000	392,003,928	8,271,535	400,275,463
9	Lumban Phasa	29,119,680	26,693,040	121,332,000	145,598,400	2,248,116	6,900,000	37,800,000	369,691,236	8,469,359	378,160,595
10	Lumban Phasa Saroha	29,119,680	26,693,040	145,598,400	145,598,400	2,421,048	7,200,000	37,800,000	394,430,568	8,291,161	402,721,729
11	Lumban Rau Barat	29,119,680	26,693,040	145,598,400	194,131,200	2,766,912	7,200,000	37,800,000	443,309,232	8,517,234	451,826,466
12	Lumban Rau Selatan	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,208,445	268,415,713
13	Lumban Ruhap	29,119,680		145,598,400	145,598,400	2,075,184	6,900,000	28,200,000	357,491,664	8,384,164	365,875,828
14	Pagar Batu	29,119,680	26,693,040	145,598,400	145,598,400	2,421,048	7,200,000	28,200,000	384,830,568	8,294,819	393,125,387
15	Panamparan	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,371,537	319,884,109
16	Pangurjungen	29,119,680	26,693,040	121,332,000	121,332,000	2,075,184	6,900,000	28,200,000	335,651,904	8,372,499	344,024,403
17	Paratungan	29,119,680	26,693,040	121,332,000	48,532,800	1,902,252	7,200,000	28,200,000	262,979,772	8,192,124	271,171,896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Parsburan Barat	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	2,075,184	7,200,000	28,200,000	335,951,904	8,484,242	344,436,146
19	Sibuntuon	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	2,075,184	7,200,000	28,200,000	335,951,904	8,644,892	344,596,796
20	Tuan Marni	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,156,486	319,679,058
21	Tornogedang	29,119,680	26,693,040	145,598,400	194,131,200	2,766,912	7,200,000	28,200,000	433,709,232	8,409,353	442,118,585
		611,513,280	480,474,720	2,960,500,800	2,499,439,200	45,654,048	150,000,000	640,200,000	7,387,782,048	175,517,909	7,563,299,957
XIII	KEC. SILAEN									0	
1	Dalihan Natolu	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	2,075,184	7,200,000	28,200,000	335,951,904	8,143,537	344,095,441
2	Hutagaol Sibujur	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,114,861	295,188,101
3	Hutagurgur I	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,110,762	292,757,362
4	Hutagurgur II	29,119,680	26,693,040	121,332,000	72,799,200	1,729,320	6,900,000	28,200,000	286,773,240	8,010,870	294,784,110
5	Hutanamora	29,119,680	26,693,040	145,598,400	121,332,000	2,248,116	7,200,000	37,800,000	369,991,236	8,361,338	378,352,574
6	Lumban Dolok	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	309,085,932	8,114,335	317,200,267
7	Marbulang	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,041,998	295,115,238
8	Mecranit Barat	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,475,817	319,988,389
9	Napitupulu	29,119,680	26,693,040	121,332,000	72,799,200	1,729,320	6,900,000	28,200,000	286,773,240	8,065,284	294,838,524
10	Natalutuli	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,253,325	292,900,125
11	Ombur	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,178,587	268,385,855
12	Panndii	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,096,733	319,609,305
13	Pardomuan	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	37,800,000	318,685,932	8,241,287	326,927,219
14	Pursambulan	29,119,680		145,598,400	121,332,000	2,075,184	7,200,000	28,200,000	333,525,264	8,159,610	341,684,874
15	Pitu Batu	29,119,680		145,598,400	121,332,000	2,075,184	7,200,000	37,800,000	343,125,264	8,279,449	351,404,713
16	Sibide	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	309,085,932	8,810,456	317,896,388
17	Sibide Barat	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	309,085,932	8,538,884	317,624,816
18	Sugedang Tua	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,147,660	268,354,928
19	Silaen	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	2,075,184	7,200,000	37,800,000	345,531,904	8,199,085	353,750,989
20	Simanobak	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,123,480	319,636,052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Situa Dame	29,119,680	26,693,040	121,332,000	24,266,400	1,383,456	6,900,000	28,200,000	237,804,576	8,129,786	246,024,362
22	Siringkingon	29,119,680	26,693,040	121,332,000	72,799,200	1,729,320	6,900,000	28,200,000	286,773,240	8,092,137	294,865,377
23	Sitarang	29,119,680		145,598,400	121,332,000	2,075,184	7,200,000	28,200,000	333,525,264	8,167,805	341,693,069
	TOTAL	669,752,640	320,316,480	3,251,697,600	1,868,512,800	42,541,272	164,400,000	687,000,000	7,004,220,792	188,857,286	7,193,078,078
	KEC. LUMBAN JULU										
1	Aek Natolu Jaya	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	2,075,184	7,200,000	37,800,000	345,551,904	8,376,728	353,928,632
2	Hatunggan	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,373,743	295,446,983
3	Hutanamora	29,119,680		121,332,000	24,266,400	1,210,524	6,900,000	28,200,000	211,028,604	8,223,586	219,252,190
4	Jangga Dolok	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,213,059	292,859,659
5	Jangga Toruan	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	37,800,000	318,685,932	8,299,855	326,985,787
6	Jonggi Nihuta	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,100,832	295,174,072
7	Lintong Julu	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	37,800,000	294,246,600	8,582,887	302,829,487
8	Pasar Lumban Julu	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	37,800,000	294,246,600	8,109,230	302,355,830
9	Sibaruang	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	37,800,000	294,246,600	8,288,304	302,534,904
10	Sionggang Selatan	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,159,001	268,366,269
11	Sionggang Tengah	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	37,800,000	294,246,600	8,248,052	302,494,652
12	Sionggang Utara	29,119,680	26,693,040	121,332,000	97,065,600	1,902,252	6,900,000	47,400,000	330,412,572	8,400,172	338,812,744
	TOTAL	340,436,160	106,772,160	1,698,648,000	825,057,600	20,751,840	85,800,000	415,200,000	3,501,665,760	99,375,449	3,601,041,209
	KEC. PORSEA									0	
1	Amborgang	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	37,800,000	294,246,600	8,226,858	302,473,458
2	Gala-Gala Pangkajenean	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,098,968	295,172,208
3	Lumban Gurning	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,147,828	292,794,428
4	Nalela	29,119,680		121,332,000	48,532,800	1,383,456	6,900,000	37,800,000	245,067,936	8,174,504	253,242,440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Parparean I	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	37,800,000	321,112,572	8,188,876	329,301,448
6	Parparean II	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	37,800,000	296,673,240	8,249,442	304,922,682
7	Parparean IV	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	37,800,000	321,112,572	8,180,756	329,293,328
8	Patane I	29,119,680		121,332,000	72,799,200	1,556,388	6,900,000	37,800,000	269,507,268	8,177,967	277,685,235
9	Patane II	29,119,680	26,693,040	121,332,000	48,532,800	1,556,388	6,900,000	37,800,000	271,933,908	8,235,639	280,169,547
10	Patane IV	29,119,680		121,332,000	72,799,200	1,556,388	6,900,000	37,800,000	269,507,268	8,306,662	277,813,930
11	Patane V	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	37,800,000	321,112,572	8,196,376	329,308,948
12	Raut Bosi	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	37,800,000	269,807,268	8,211,904	278,019,172
13	Silamosik I	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,132,731	319,645,303
14	Simpang Sigura-gura	29,119,680	26,693,040	145,598,400	24,266,400	1,556,388	7,200,000	37,800,000	272,233,908	8,226,452	280,460,360
	TOTAL	407,675,520	213,544,320	1,941,312,000	849,324,000	23,691,684	99,600,000	500,400,000	4,035,547,524	114,754,963	4,150,302,487
XVI	KEC. BALIGE										
1	Aek Bolon Jae	29,119,680		121,332,000	97,065,600	1,729,320	6,900,000	28,200,000	284,346,600	8,079,214	292,425,814
2	Aek Bolon Julu	2,426,640		145,598,400	72,799,200	1,556,388	7,200,000	28,200,000	257,780,628	8,157,663	265,938,291
3	Balige II	29,119,680	26,693,040	145,598,400	24,266,400	1,556,388	7,200,000	28,200,000	262,633,908	8,143,263	270,777,171
4	Baruara	29,119,680	26,693,040	121,332,000	121,332,000	2,075,184	6,900,000	47,400,000	354,851,904	8,114,052	362,965,956
5	Bonan Dobok I	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,113,245	292,759,845
6	Bonan Dobok II	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,087,543	295,160,783
7	Bonan dolok III	29,119,680		145,598,400	48,532,800	1,556,388	7,200,000	28,200,000	260,207,268	8,749,113	268,956,381
8	Hinalang Bagasan	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	37,800,000	294,246,600	8,692,201	302,938,801
9	Huta Bulu Mejan	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,102,378	292,748,978
10	Hutadame	29,119,680		121,332,000	48,532,800	1,383,456	6,900,000	28,200,000	235,467,936	8,255,263	243,723,199
11	Hutagaol Peatalun	29,119,680	26,693,040	121,332,000	121,332,000	2,075,184	6,900,000	37,800,000	345,251,904	8,554,203	353,806,107
12	Hutanamora	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,646,600	8,270,548	292,917,148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Longat	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,082,930	295,156,1
14	Lumban Bul-bal	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	303,085,932	8,340,051	317,425,9
15	Lumban Gaol	29,119,680	26,693,040	121,332,000	72,799,200	1,729,320	6,900,000	37,800,000	296,373,240	8,314,307	304,687,5
16	Lumban Gorat	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	284,546,600	8,086,050	292,732,6
17	Lumban pa	29,119,680	26,693,040	97,065,600	97,065,600	1,729,320	6,600,000	47,400,000	305,573,240	8,243,934	313,917,1
18	Lumban Pa Timur	29,119,680	26,693,040	145,598,400	97,065,600	2,075,194	7,200,000	37,800,000	345,551,904	8,197,867	353,749,7
19	Lumban Sibatong	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	309,085,932	8,307,318	317,393,2
20	Matio	29,119,680		121,332,000	72,799,200	1,556,388	6,900,000	28,200,000	259,907,268	8,221,136	268,128,4
21	Pamdean	29,119,680		121,332,000	48,532,800	1,383,456	6,900,000	28,200,000	235,467,936	8,122,866	243,590,8
22	Pasurutan	29,119,680	26,693,040	145,598,400	72,799,200	1,902,252	7,200,000	28,200,000	311,512,572	8,162,101	319,674,6
23	Saribu Raja JM		26,693,040	121,332,000	97,065,600	1,729,320	6,900,000	28,200,000	281,519,960	8,400,046	290,320,0
24	Siampar Sibahil-Hail	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	305,085,932	8,281,873	317,367,8
25	Sibelahatang SAS	29,119,680		145,598,400	72,799,200	1,729,320	7,200,000	28,200,000	281,546,600	8,464,087	293,110,6
26	Sibonun	29,119,680	26,693,040	121,332,000	0	1,210,524	6,900,000	28,200,000	213,455,244	8,061,725	221,516,9
27	Sibuntuon	29,119,680		145,598,400	97,065,600	1,902,252	7,200,000	28,200,000	309,085,932	8,061,474	317,147,4
28	Sialahi pager Batu	29,119,680		121,332,000	48,532,800	1,383,456	6,900,000	37,800,000	245,057,936	8,220,519	253,288,4
29	Tambunan Sunge	29,119,680	26,693,040	145,598,400	48,532,800	1,729,320	7,200,000	28,200,000	287,073,240	8,113,929	295,187,1
		788,658,000	320,316,480	3,931,156,800	2,111,176,800	49,804,416	205,200,000	904,200,000	8,310,512,496	239,000,905	8,549,513,4
	TOTAL	6,670,833,360	2,989,620,480	18,515,263,200	18,515,263,200	420,397,692	1,645,500,000	7,147,800,000	69,590,927,592	1,909,072,468	71,500,000,0

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

